

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022



KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
KATA PENGANTAR		v
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja		1
1.3 Isu – isu Strategis		9
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran		10
1.5 Sistematika Penyusunan		14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021		15
BAB II PERENCANAAN KINERJA		17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD		17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan		19
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022		21
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja		24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi		26
3.2 Efisiensi Anggaran		35
3.3 Inovasi		37
3.4 Penghargaan		38
BAB IV PENUTUP		39
4.1 Kesimpulan		39
4.2 Rekomendasi		39
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1.4	Sarana Prasarana Kecamatan Limbangan	11
Tabel 1.5	Alokasi Anggaran Kecamatan Limbangan Tahun 2022	13
Tabel 1.6	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP	15
Tabel 2.1	Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja	18
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel 2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 2.4	Tabel Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2022	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2022	26
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	28
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja beserta Anggaran Tahun 2021 dan 2022	28
Tabel 3.6	Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	30
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	31
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	32
Tabel 3.10	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	34
Tabel 3.11	Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Tahun 2022	35
Tabel 3.12	Pencapaian Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	37
Tabel 3.13	Pencapaian Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Limbangan	8
Gambar 2.1	Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Limbangan	9
Gambar 2.2	Sarana Prasarana Ruang Pelayanan	13
Gambar 2.3	Rapat staf dalam rangka reuiu dan monev komponen evaluasi AKIP internal	16
Gambar 2.4	Peningkatan Kompetensi SDM penyusun laporan LKJIP	16
Gambar 3.1	Inovasi Aplikasi Silakus	38
Gambar 3.2	Penghargaan Capaian PBB	38

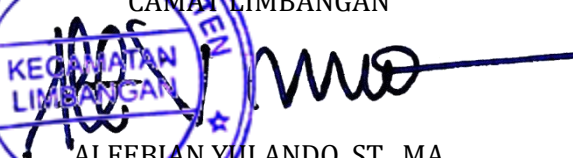
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa Kami panjatkan atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

LKJIP Kecamatan Limbangan Tahun 2022 disusun berdasarkan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Limbangan serta Rencana Strategis Kecamatan Limbangan Tahun 2021-2026.

Adapun Maksud dan Tujuan daripada penyusunan LKJIP ini adalah sebagai wujud sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good and Clean Governance) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain itu, LKJIP ini memuat unsur-unsur perencanaan strategis dan Perencanaan kinerja, serta analisis pencapaian Kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Limbangan Tahun anggaran 2022.

Pada Akhirnya, semoga LKJIP ini dapat menjadi Landasan fundamental bagi Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam tahun-tahun mendatang.

Kendal, Januari 2023
CAMAT LIMBANGAN

ALFEBIAN YULANDO, ST., MA
Pembina Tk I
NIP. 197707012005011011



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Adapun dasar hukum Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, maka Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- e. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada

masyarakat yang bersifat rutin.

- g. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- h. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat mempunyai **tugas** :

- 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Camat mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat mempunyai **rincian tugas** :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Penyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

- j. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. Menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- n. Menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- q. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
- s. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- u. Melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

- pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- v. Membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - w. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/ kelurahan;
 - x. Menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
 - y. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
 - z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 - aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - bb. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 terdiri dari :

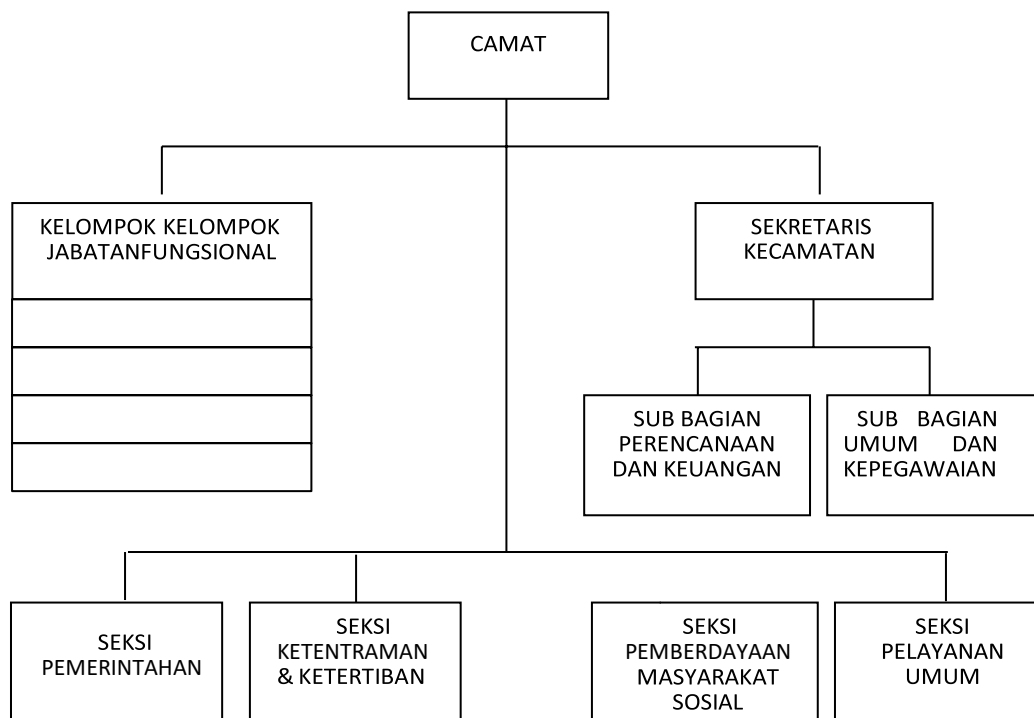
- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat ;

- f. Seksi Pelayanan Umum ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Limbangan Sesuai Peraturan Bupati Kendal No. 77 tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

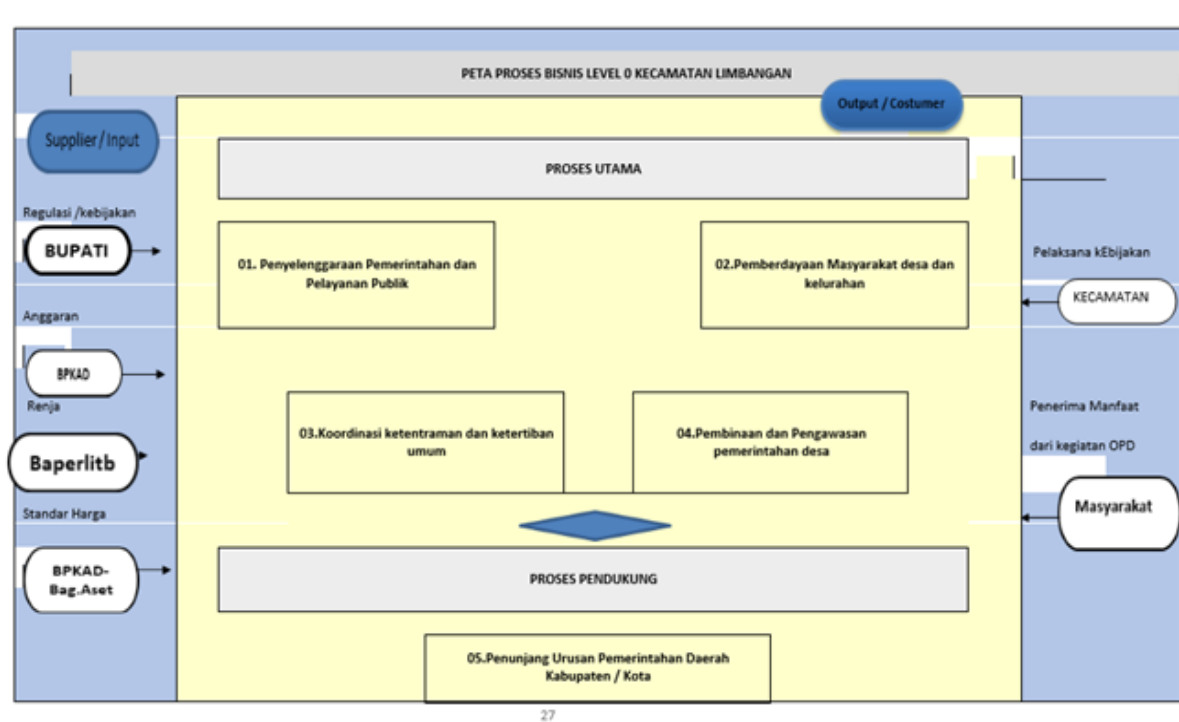
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Limbangan



Selanjutnya untuk mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka Kecamatan Limbangan menyusun Peta Proses Bisnis.

Gambar 1.2

Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Limbangan



1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- PBB belum mencapai target maksimal dikarenakan banyak terdapat obyek ganda, salah luas dan pemilik obyek bertempat tinggal di luar daerah ;
- Kurangnya personil staf fungsional umum di Kecamatan, sehingga beberapa personil yang ada merangkap pekerjaan;
- Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana teknologi informasi di wilayah Kecamatan limbangan sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi maka diperlukan adanya pelatihan dalam

mengoperasikan/pemanfaatan teknologi informasi; dan

- Permasalahan jaringan internet di Kecamatan Limbangan yang kadangkala offline, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pekerjaan yang menggunakan aplikasi seperti SIPD, SIMDA, RUP, SIMPOK, LAPOR, SIMONEV, RENJA, E-SAKIP, dan lain-lain.

1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

A. Potensi Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Limbangan didukung oleh personil SDM sebanyak 24 terdiri, dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 19 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan sisanya sebanyak 2 orang merupakan tenaga honorer dan 3 tenaga linmas.

Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Limbangan masih belum memenuhi pola maksimal sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sebagai OPD Kecamatan Limbangan hanya menerima penempatan pegawai dari Kabupaten sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2021. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Limbangan dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri	19	9	10
2	Tenaga Penunjang Kegiatan	2	1	1
3	Tenaga Linmas	3	3	0
TOTAL		24	13	11

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2022

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	19	2	10	7	-
TOTAL		19	2	10	7	-

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2022

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	19	0	1	10	2	6	0	0
2	Tenaga Penunjang Kegiatan	2	0	0	1	0	1	0	0
3	Tenaga Linmas	3	0	0	1	0	2	0	0
TOTAL		24	0	1	12	2	9	0	0

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2022

B. Sarana Prasarana

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Kecamatan Limbangan

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Gedung Pendopo dan Ruang Rapat	unit	1	-	-
2	Rumah Dinas	unit	1	-	-
3	Gedung kantor Pelayanan umum	unit	1	-	-
4	Gedung kantor Sekretariat	unit	1	-	-
5	Musholla	unit	1	-	-
6	Tempat parkir	unit	1	-	-

7	Gedung PBB	unit	1	-	-
8	Almari kaca	buah	2	-	-
9	Almari besi	buah	2	-	-
10	Kursi lipat	buah	99	-	-
11	Kursi kerja eselon	buah	2	-	-
12	Kursi kerja staf	buah	7	-	-
13	Meja tulis	buah	20	-	-
14	Meja komputer	buah	5	-	-
15	Filling cabinet	buah	8	-	-
16	Komputer	unit	10	-	-
17	Lap top	buah	5	-	-
18	AC	unit	7	-	-
19	Meja kerja eselon	Buah	2	-	-
20	Meja kerja non struktural	Buah	12	-	-
21	Televisi	Buah	2	-	1
22	Meja Rapat	Buah	7	-	-
23	Meja kursi tamu	Set	4	-	-
24	Kulkas	Buah	2	-	-
25	Mesin absen	Buah	1	-	-
26	Mesin penghancur kertas	Buah	1	-	-
27	Mesin pemotong rumput	Buah	1	-	1
28	Kursi tunggu	Set	2	-	2
29	Camera	Buah	-	-	-
30	Handy cam	Buah	-	-	-
31	LCD	Buah	1	-	-
32	Layar OHP	Buah	1	-	-
33	Sound sistem	Unit	1	-	-
34	Mobil	Buah	2	1	-
35	Sepeda motor	Buah	28	-	-
36	Mesin ketik	Buah	1	-	-
37	Kipas angin	Buah	6	-	-
38	Telephone/faximili	Buah	1	-	-
39	Mobile Rock	Buah	1	-	-
40	Mesin diesel	Buah	1	1	-
41	AC	Unit	5	-	-
42	Lemari kayu	Buah	4	-	-
43	Meja makan	Set	1	-	-
44	Papan nama kantor	Buah	1	-	-

45	Papan pengumuman	Buah	2	-	-
46	Running Text	Unit	1	-	-

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset (Bakeuda Kab. Kendal)

Gambar 1.3
Sarana Prasarana Ruang Pelayanan



C. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan tahun 2022 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp.2.958.898.284,- yang terdiri dari

- Belanja Langsung : Rp. 672.455.500,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.286.442.784,-

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Kecamatan Limbangan Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.713.019.284,-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.172.000,-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.343.000,-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	144.714.000,-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.650.000,-
	TOTAL	2.958.898.284,-

1.5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- d. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kecamatan Limbangan terhadap 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja, beserta tindak lanjut atas saran/rekomendasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Guna perbaikan pada sub komponen Perencanaan Kinerja yang lebih baik, diharapkan : a. Dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu; b. Area perbaikan perlu ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang lebih baik	Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan
2	Guna perbaikan pada komponen pengukuran kinerja yang lebih berkualitas diharapkan dalam penyusun laporan kinerja terkait pengumpulan sumber data/primer sebagai dasar dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan	Sudah dilaksanakan
3	Guna perbaikan pada komponen pelaporan kinerja yang berkualitas agar penyusunan laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya serta menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan yang dihadapi	Sudah dilaksanakan
4	Guna perbaikan kriteria pada sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terkait keberadaan dokumen pelaporan kinerja untuk dilakukan reviu secara berjenjang pada saat penyusunan dokumen kinerja	Sudah dilaksanakan melalui rapat koordinasi internal rutin/rapat staf/POK

5	Guna perbaikan kriteria pada sub komponen terkait evaluasi kinerja internal perlu dilakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani penyusunan laporan kinerja melalui Bimtek/Diklat yang diselenggarakan oleh lembaga/Instansi yang kompeten/ terakreditasi	Sudah dilaksanakan dengan mengikutkan dalam Asistensi Penguatan Implementasi SAKIP dan RB
---	--	---

Gambar 1.4

Rapat staf dalam rangka reviu dan monev komponen evaluasi AKIP internal



Gambar 1.5

Peningkatan Kompetensi SDM penyusun laporan LKJIP
(Mengikuti Asistensi Penguatan Implementasi SAKIP dan RB)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Limbangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026.

A. Visi dan Misi

VISI PEMERINTAH KECAMATAN LIMBANGAN

Mengacu pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026” dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Limbangan saat ini, maka Pemerintah Kecamatan Limbangan memiliki visi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah :

“Terciptanya Pelayanan yang Optimal Didukung SDM yang Berkualitas, Menuju Masyarakat Limbangan yang Sejahtera dan Madani”

MISI PEMERINTAH KECAMATAN LIMBANGAN

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kecamatan Limbangan telah menetapkan Misi sesuai dengan misi kelima dari Bupati terpilih sebagai misi Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.”.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Kecamatan Limbangan mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Maka tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Limbangan adalah: ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.***

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang lebih pendek dari tujuan, secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”, dengan indikator sasaran :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Kecamatan secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	1. Nilai IKM	93	94	95	96	97	97
			2. Nilai SAKIP	64	64,5	65	65	65	66

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIMDA Keuangan
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor
9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa

10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan
12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur 5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIMDA/SIPD Keuangan 6. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD 7. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/ instansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor 8. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan 9. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan	a. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM b. Peningkatan kuantitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD kecamatan e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan fokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA/SIPD Keuangan f. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIMDA BMD g. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/ instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan h. Peningkatan agamis dalam kehidupan masyarakat difokuskan pada desa yang kerukunan antarumat beragama masih rendah i. Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskan pada desa yang kondisinya kurang aman

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pemerintah Kecamatan Limbangan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Limbangan Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Limbangan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian kinerja Kecamatan Limbangan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		94
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	%	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	33
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrriban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	%	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan		64,5
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100

Sesuai dengan Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 5 program dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2022

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.713.019.284,-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	6.172.000,-

3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	33.343.000,-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	144.714.000,-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	61.650.000,-

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Limbangan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. Government Resources Management System (GRMS);

Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas e-planning , e-budgetting, e-penatausahaan, e-controlling yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Kecamatan Limbangan;

2. SIPD;

3. SIMDA;

4. Si – EVA;

5. SiMPOK;

6. E-SAKIP;

7. SiRUP;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Limbangan.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	94	94,7	100,7	Sangat tinggi
	Nilai SAKIP Kecamatan	64,5	64,35	99,77	Baik

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2022, untuk indikator Nilai IKM tercapai score 94,7 dari target sebesar 94 atau tercapai 100,7 %, sedangkan untuk indikator Nilai Sakip Kecamatan tercapai score 64,35 dari target sebesar 64,5 atau tercapai 99,77 % dan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2022

No.	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94	94,7	100,7	Sangat Tinggi	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	6.172.000	6.172.000	100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	33.343.000	33.343.000	100		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	144.714.000	144.630.545	99,94		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	61.650.000	61.650.000	100		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	64,5	64,35	99,77	Baik	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawai an dan keuangan Perangkat Daerah	2.713.019.284	2.530.756.580	93,28		

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93	91,44	98,32	94	94,7	100,7
		Nilai SAKIP Kecamatan	64	65	101,6	64,5	64,35	99,77

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM, memiliki data tingkat capaian di tahun 2021 sebesar 98,32% sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 100,7 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP tingkat capaian tahun 2021 sebesar 101,6% dan untuk tahun 2022 sebesar 99,77 % sedikit mengalami penurunan dari tingkat pencapaian dari tahun 2021.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja beserta Anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93	91,44	98,32	94	94,7	100,7
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	15.801.000	15.765.000	99,77	6.172.000	6.172.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	46.870.000	42.860.000	99,97	33.343.000	33.343.000	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	76.310.000	76.276.000	99,95	144.714.000	144.630.545	99,94

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	18.145.000	18.077.000	99,62	61.650.000	61.650.000	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	64	65	101,6	64,5	64,35	99,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	2.370.362.319	2.147.837.180	90,61	2.713.019.284	2.530.756.580	93,28

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 3.6

Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	94,7	97	97.6 %
		Nilai Sakip Kecamatan	64,35	66	97,5 %

Dari uraian tabel diatas bahwa untuk indikator kinerja indek Kepuasan Masyarakat maupun nilai Sakip Kecamatan memiliki tingkat kemajuan diatas 95% sehingga harapan cukup tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun Rencana Strategis 2021-2026.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi Nasional

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	Realisasi Nasional	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	94,7	-	
		Nilai Sakip Kecamatan	64,35	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Limbangan untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Limbangan dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2021 yang disajikan oleh kantor kecamatan Limbangan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar 64,35 dengan kategori Baik dengan Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2022 Nilai IKM : 94 diperoleh nilai IKM : 94,7 sehingga dapat tercapai :

100,7 % dan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Limbangan, dari target tahun 2022 sebesar : 64,5 didapat nilai tahun 2022 : 64,35 sehingga tercapai 99,77 %.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan public yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94	94,7	100,7	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan sumberdaya yang ada	Mempertahankan kualitas pelayanan publik
	Nilai SAKIP Kecamatan	64,5	64,35	99,77	Program terkait peningkatan skor SAKIP sudah sesuai perlu lebih ditingkatkan	Meningkatkan monev dan koordinasi serta kompetensi SDM pengelola

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp.2.958.898.284,- yang terdiri dari Rp. 672.455.500,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 2.286.442.784,- untuk Belanja Langsung. Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 667.149.940,- atau sebesar 99,2%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp2.109.402.185,- atau 92%.

Secara Keseluruhan efisiensi penggunaan sumber dana adalah sebesar 6,2% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.2.776.552.125,- atau penggunaan sebesar 93,8%
Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanyapemerintahan yang *Good Governance*;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
7. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;
8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	94	94,7	100,7	245.879.000	245.795.545	99,94	0,06
	64,5	64,35	99,77	2.713.019.284	2.530.756.580	93,28	6,72

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 5 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022

Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrriban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.10
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkat- nya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM	100,7				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan	99.77				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tesebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber – sumber keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2022 dialokasikan di Kecamatan Limbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan maupun program kegiatan yang telah direncanakan dan disusun yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		6.172.000	6.172.000	100
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	6.172.000	6.172.000	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terjait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6.172.000	6.172.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		33.343.000	33.343.000	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.343.000	33.343.000	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	10.050.000	10.050.000	100
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	23.293.000	23.293.000	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		144.714.000	144.630.545	99,94
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	134.554.000	134.470.545	99,94
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	134.554.000	134.470.545	99,94
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	10.160.000	10.160.000	100

		Ketertiban Umum			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	10.160.000	10.160.000	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		61.650.000	61.650.000	100
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.650.000	61.650.000	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.175.000	35.175.000	100
		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	26.475.000	26.475.000	100
Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan pemerintahan		2.713.019.284	2.530.756.580	93,28
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.450.000	18.450.000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laopran Caaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.450.000	18.450.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.286.442.784	2.109.402.185	92,26
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.253.692.784	2.076.652.185	92,14
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.750.000	32.750.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.981.500	118.978.500	99,16
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	22.949.500	22.949.500	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.343.500	37.340.500	99,99
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	9.625.000	9.625.000	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan	1.320.000	1.320.000	100
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.743.500	47.743.500	97,95
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.276.000	115.033.205	97,26
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	22.310.169	92,96
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkaan Kantor	38.540.000	37.045.000	96,12
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	50.736.000	50.678.036	99,89

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.869.000	168.892.690	99,43
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	169.869.000	168.892.690	99,43

Tabel 3.12

Pencapaian Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	2.713.019.284	2.530.756.580	93,28
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	6.172.000	6.172.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.343.000	33.343.000	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	144.714.000	144.630.545	99,94
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.650.000	61.650.000	100

Tabel 3.13

Pencapaian Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	94	94,7	100,7	245.879.000	245.795.545	99,94
	Nilai Sakip Kecamatan	64,5	64,35	99,76	2.713.019.284	2.530.756.580	93,28

Untuk penyerapan anggaran yang kurang dari atau tidak bisa mencapai 100% tidaklah dianggap sebagai kegagalan akan tetapi menggambarkan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena target kinerja sudah terpenuhi dan merupakan anggaran yang bersifat penyediaan / sisa lelang.

3.3. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2022 terdapat inovasi yang

dilaksanakan Kecamatan Limbangan :

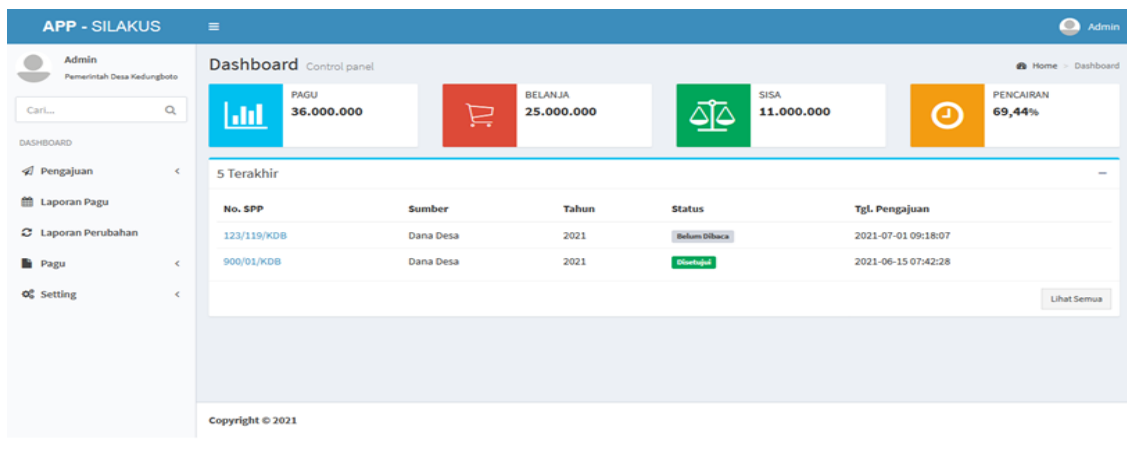
1. Inovasi Aplikasi Silakus (Sistem Pelaporan Keuangan Desa)

Silakus merupakan aplikasi untuk pengajuan rekomendasi pencairan dana transfer desa meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan proses yang mudah dan cepat melalui upload berkas 3persyaratan.

Manfaat Silakus yaitu mempercepat proses pelayanan, sebagai upaya monitoring dan evaluasi dana yang telah dicairkan oleh desa, mengendalikan pencairan dana transfer, serta sebagai pengendalian SPJ dari dana yang telah dicairkan sebelumnya.

Gambar 3.1

Inovasi Aplikasi Silakus



3.3 Penghargaan

Penghargaan yang dicapai oleh Kecamatan Limbangan pada Tahun 2022 yaitu Penghargaan Bupati Kendal atas pencapaian Kecamatan Limbangan sebagai Kecamatan dengan prosentase pertumbuhan desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbanyak.

Gambar 3.2

Penghargaan Capaian PBB



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategic dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2022 pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (100,7%) atau mendapat predikat sangat baik
- b. Capaian Nilai SAKIP Kecamatan mendapat predikat sangat baik (99,7%)
- c. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Limbangan didukung 5 program dengan realisasi anggaran 93,8%

4.2. Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.
5. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap 5 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi AKIP dan Evaluasi Kinerja Internal) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang



Limbangan, Januari 2023

CAMAT LIMBANGAN

ALEEBIAN YULANDO, ST., MA

Pembina Tk. I

NIP. 197707012005011011